

Jakarta, 09 Feb 2018

TOLAK PENAMBAHAN KURSI KETUA DPR

Oleh: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Seperti yang diketahui publik, pemerintah dan delapan fraksi DPR RI menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang sudah selesai dibahas di Baleg (Badan Legislatif). Agenda revisi Pasal 427A huruf C tentang penambahan kursi ketua DPR dan MPR rencananya akan dibawa kesidang paripurna. Menyikapi hal tersebut FITRA menolak kebijakan tersebut karena terkesan hanya mengakomodir kepentingan pragmatis karena hanya bicara terkait kursi pimpinan bukan hal yang lebih urgensi seperti bagaimana menjaga marwah lembaga. FITRA berharap pemerintah kembali ke mekanisme sebelumnya dan membatalkan inisiatif tersebut. Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan FITRA kenapa revisi tersebut perlu ditolak:

1. Menjaga Kewibawaan DPR

Seperti yang kita ketahui, DPR merupakan lembaga pemerintah yang paling sering disoroti, selain karena minimnya kinerja (fungsi DPR tidak maksimal), banyaknya anggota DPR yang tertangkap kasus hukum membuat citra dan kewibawaan DPR semakin menurun. FITRA berpendapat, penambahan kursi ketua akan menambah buruknya citra lembaga legislatif tersebut. Ketimbang membuat kebijakan yang cenderung pragmatis, DPR lebih baik mengefektifkan kinerja sampai akhir periode, jika ada perubahan lebih baik dibawas atau untuk priode berikutnya.

2. Penambahan Anggaran Yang Tidak Perlu

Menambahnya kursi pimpinan tentu akan berdampak ada penambahan anggaran seperti gaji. FITRA berpendapat, jika revisi tersebut digolkan maka akan ada konsekuensi anggaran yang harus disediakan pemerintah. FITRA merasa penambahan anggaran tersebut tentu sangat tidak perlu. DPR seolah tidak sensitif dengan kondisi keuangan negara saat ini. Menurut perhitungan FITRA, satu ketua DPR bisa mengantongi gaji bersih sekitar Rp. 813 juta pertahun diluar fasilitas penunjang. (LAMPIRAN)

Berdasarkan pembasan di atas, Fitra ***merekomendasikan*** agar pemerintah membatalkan rencana tersebut. Jika mau ada revisi DPR harus lebih mempertimbangkan kajian komperhensif ketimbang kalkulasi politik, dan dilakukan di priode mendatang.

CP :

Yenny Sucipto (Sekjen FITRA) 0812-2224-0008

LAMPIRAN

GAJI BERSIH KETUA DPR RI (bulan)

SURAT Meteri Keuangan No.5. 520/ MK.02/2015

1	Gaji Dan Tunjangan	29.435.683
a	Gaji Pokok	5.040.000
	Tunjangan Jabatan dan	
b	lain-lain	24.395.683
2	Penerimaan Lainnya	38.358.000
a	Tunjangan Kehormatan	6.690.000
	Tunjangan Komunikasi	
b	Intensif	16.468.000
	Tunjangan Peningkatan	
	Fungsi Pengawasan dan	
c	Anggaran	5.250.000
	Bantuan Langganan Listrik	
d	dan Telepon	7.700.000
e	Asisten Anggota	2.250.000
	TOTAL	67.793.683